

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Pemikiran tersebut sudah mendapatkan legalitas internasional dengan adanya program *Education For All* dari UNESCO.

Dalam konteks ini, Azra (2006) menegaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurutnya juga bahwa pendidikan lebih daripada sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah diatur oleh pemerintah dengan sistematis tentang sistem dan pola

pendidikan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal tersebut, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam undang-undang itu juga diatur mengenai hak dan kewajiban warga Negara terhadap pendidikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Artinya setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, dan ini dijamin oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagaimana pada pasal selanjutnya yang berbunyi: “*pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi*”. Pasal ini mengandung arti bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia telah direncanakan dengan matang oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Sukmadinata (2008) menganggap bahwa, pendidikan memegang peranan kunci *dalam* pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas. Secara kuantitas, kemajuan pendidikan di Indonesia cukup menggembirakan, namun secara kualitas, perkembangannya masih belum merata. Hal ini ditengarai dengan adanya penelitian yang berkenaan dengan pengendalian mutu atau upaya-upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan.

Pemikiran di atas mengindikasikan bahwa setiap warga negara Indonesia, apapun status sosialnya, berhak atas pendidikan menengah yang bermutu sesuai dengan UU Sisdiknas No. 20/2003, pasal 5 ayat 1. Pendidikan yang bermutu tentunya berujung pada penciptaan sekolah yang bermutu sebagai ujung tombak institusi pendidikan menengah. Dalam hal ini, penciptaan sekolah menengah yang bermutu merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder* pendidikan.

Pendidikan yang bermutu, dalam arti menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan masyarakat, baik dalam kualitas pribadi, moral, pengetahuan maupun kompetensi kerja menjadi syarat mutlak dalam kehidupan masyarakat global yang terus berkembang saat ini dan yang akan datang. Dalam merealisasikan pendidikan yang bermutu, dituntut penerapan program mutu yang terfokus pada upaya-upaya penyempurnaan mutu seluruh komponen dan kegiatan.

Selanjutnya untuk meningkatkan mutu sekolah seperti yang disarankan oleh Danim (2007: 56), yaitu dengan melibatkan lima faktor yang dominan:

1. Kepemimpinan Kepala sekolah; kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.
2. Siswa; pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat” sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa.

3. Guru; keterlibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, MGMP, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah.
4. Kurikulum; adanya kurikulum yang ajeg/tetap tetapi dinamis, dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga tujuan dapat dicapai secara maksimal;
5. Jaringan Kerjasama; jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua & masyarakat) tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan/instansi sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja.

Sekolah merupakan salah satu sarana untuk membangun masyarakat. Sekolah juga dapat dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat, baik lokal, regional maupun global. Manusia Indonesia yang diharapkan saat ini adalah manusia yang mampu mengembangkan keseluruhan potensi yang dimilikinya. Gambaran manusia Indonesia yang seutuhnya tersebut telah dirumuskan di dalam undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Konsep sekolah bermutu menurut Hoy dan Miskel (2008: 271) tidak bisa dilepaskan dari konsep sekolah sebagai sebuah sistem dalam arti sekolah sebagai

**Nur Ahmad Ruyani, 2012**

**Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Kepala sekolah dan Iklim Organisasi terhadap Efektivitas Sekolah ( Studi Deskriptif Analitik di SMP Negeri Kota Bandung)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

institusi, tidaklah berdiri sendiri. Ia terkait erat dengan nilai, budaya, dan kebiasaan yang hadir di masyarakat. Sekolah merupakan ujung tombak dari proses modernisasi (*agent of change*) yang diupayakan melalui kebijakan pemerintah. Produk dari sebuah sekolah harus berupa lulusan yang memiliki kompetensi unggul agar mampu menghadapi kompetisi di jenjang yang lebih tinggi atau di “pasar” tenaga kerja.

Terkait hal di atas, tingkat kelulusan Ujian Nasional SMP di kota Bandung pada tahun 2011 ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada tahun ini, 99,9% peserta UN SMP di kota Bandung lulus, sementara tahun lalu 99,8%. Di samping itu, rata-rata nilai Ujian Nasional SMP tahun 2011 pun meningkat, pada tahun 2010 sebesar 24,94 naik menjadi 31,51. Demikian juga rata-rata nilai tertinggi UN di tiap sekolah meningkat, yakni pada tahun 2010 sebesar 34,97 naik menjadi 35,94 pada tahun ini. Untuk rata-rata nilai terendah pun mengalami kenaikan dari 21,94 pada tahun 2010 menjadi 24,27 pada tahun 2011. Seluruh peserta UN yang berasal dari SMP Negeri di kota Bandung dipastikan lulus, siswa yang tidak lulus UN tersebut, berasal dari SMP Swasta. Hal ini dapat menjadikan angin segar bagi duniapendidikan khususnya di kota Bandung.

Namun, jika merujuk kepada total keseluruhan tingkat kelulusan Ujian Nasional siswa SMP sederajat di Jawa Barat, pada tahun 2011 ini menurun. Dari 636.511 peserta ujian, hanya 97,59% saja yang lulus. Dan terdapat 15.000 siswa diantaranya dinyatakan belum lulus, di mana pada tahun sebelumnya tingkat kelulusan Ujian Nasional SMP sederajat di Jawa Barat mencapai lebih dari 98%.

**Nur Ahmad Ruyani, 2012**

**Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Kepala sekolah dan Iklim Organisasi terhadap Efektivitas Sekolah ( Studi Deskriptif Analitik di SMP Negeri Kota Bandung)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu



Terkait konteks di atas, tenaga guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang mempunyai peran sebagai salah satu faktor penentu mutu sekolah yang pada akhirnya bermuara pada keberhasilan tujuan pendidikan, karena guru yang langsung berhubungan dengan peserta didik, untuk memberikan bimbingan yang akan menghasilkan tamatan yang diharapkan. Guru merupakan sumber daya manusia yang menjadi perencana, pelaku dan penentu tercapainya tujuan pendidikan. Guru merupakan tulang punggung dalam kegiatan pendidikan terutama yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar. Tanpa adanya peran guru maka proses belajar mengajar akan terganggu bahkan gagal.

Oleh karena itu, dalam manajemen pendidikan peranan guru dalam upaya keberhasilan pendidikan selalu ditingkatkan, kinerja atau prestasi kerja guru harus selalu ditingkatkan mengingat tantangan dunia pendidikan untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global.

Kinerja atau prestasi kerja (*performance*) dapat diartikan sebagai pencapaian hasil kerja sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku pada masing-masing organisasi dalam hal ini sekolah. Simamora (2000: 10) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu persyaratan-persyaratan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik yang berupa jumlah maupun kualitasnya. Output yang dihasilkan menurut Simamora dapat berupa fisik maupun non fisik yang menyebutnya berupa karya, yaitu suatu hasil/pekerjaan baik berupa fisik/material maupun non fisik maupun non material. Seorang guru dalam mengerjakan tugasnya dengan baik, seringkali ditentukan oleh penilaian terhadap

**Nur Ahmad Ruyani, 2012**

**Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Kepala sekolah dan Iklim Organisasi terhadap Efektivitas Sekolah ( Studi Deskriptif Analitik di SMP Negeri Kota Bandung)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

kinerjanya. Penilaian tidak hanya dilakukan untuk membantu mengawasi sumber daya organisasi namun juga untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Penilaian terhadap kinerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja guru, bagian-bagian yang menunjukkan kemampuan guru yang kurang dapat diidentifikasi, diketahui sehingga dapat ditentukan strategi dalam meningkatkan kinerjanya yang nantinya akan berujung pada peningkatan mutu sekolah.

Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Implikasi diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan, para pengambil keputusan seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan referensi tentang komponen pembiayaan pendidikan. Kebutuhan tersebut dirasakan semakin mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang juga meliputi bidang pendidikan. Apalagi masalah pembiayaan ini sangat menentukan kesuksesan program MBS dan KBK yang sekarang diberlakukan (Supriadi, 2006). Terkait hal tersebut, menurut Johns, Morphet, & Alexander (dalam Fattah, 2009) biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan, dan tenaga pendidik yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar. Lebih lanjut Berle & Sallis (dalam Fattah: 2009: 108) menegaskan bahwa biaya merupakan salah satu di antara sekian banyak faktor penentu mutu pendidikan yang tidak dapat dihindarkan.

**Nur Ahmad Ruyani, 2012**

**Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Kepala sekolah dan Iklim Organisasi terhadap Efektivitas Sekolah ( Studi Deskriptif Analitik di SMP Negeri Kota Bandung)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Cukup banyak studi yang dilakukan tentang pembiayaan pendidikan di Indonesia. Fokusnya lebih pada anggaran pemerintah, dengan mengabaikan peranan dana masyarakat, khususnya keluarga siswa. Sementara itu, pemerintah senantiasa mengundang masyarakat/keluarga untuk berperan serta lebih besar dalam pembiayaan pendidikan, tanpa pengetahuan yang cukup tentang berapa besar selama ini mereka telah memberikan kontribusi dimaksud.

Terkait hal di atas, setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu perlu dilihat siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan, bagaimana mereka akan dididik, siapa yang akan membayar biaya pendidikan. Demikian pula sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung sistem pembiayaan pendidikan. Tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan termasuk untuk pendidikan kejuruan dan bantuan terhadap murid. Hal itu perlu dilihat dari faktor kebutuhan dan ketersediaan pendidikan, tanggungjawab orang tua dalam menyekolahkan, *social benefit* secara luas, pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.

Konsep sekolah sebagai sebuah sistem dan organisasi tentunya memerlukan suatu pengelolaan atau manajemen yang baik agar tujuan akhir sekolah dapat tercapai. Manajemen sekolah yang baik pada gilirannya diharapkan dapat berimbas pada meningkatnya kinerja para anggota sekolah sehingga pada akhirnya sekolah bermutu pun tercipta.

**Nur Ahmad Ruyani, 2012**

**Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Kepala sekolah dan Iklim Organisasi terhadap Efektivitas Sekolah ( Studi Deskriptif Analitik di SMP Negeri Kota Bandung)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu



Masalah minimnya biaya bagi pengelolaan sekolah menengah merupakan masalah klasik dalam dunia pendidikan kita. Namun, daripada mengambil sikap menunggu uluran tangan pemerintah untuk menambah alokasi pembiayaan, para pengelola sekolah menengah lebih baik mengelola biaya tersebut seefektif mungkin. Dan dalam hal inilah manajemen pembiayaan di sekolah menengah merupakan suatu faktor yang disinyalir mampu mempengaruhi penciptaan sekolah bermutu.

Berdasarkan uraian mengenai pentingnya manajemen pembiayaan sekolah dan kinerja mengajar guru yang optimal dalam meningkatkan mutu sekolah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Kontribusi Manajemen Pembiayaan Sekolah dan Kinerja Mengajar Guru Terhadap Mutu Sekolah di SMP Negeri Se-Kota Bandung”**.

## **B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **a. Identifikasi Masalah**

Dalam pelaksanaan pendidikan di suatu lembaga, pendidikan tidak terlepas dari enam faktor pendidikan agar kegiatan pendidikan tersebut terlaksana dengan baik. Apabila salah satu faktor tidak ada maka mutu sebuah sekolah tidak dapat tercapai dengan baik karena faktor yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan saling berhubungan. Adapun keenam faktor tersebut adalah:

#### 1. Faktor Tujuan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka faktor tujuan perlu diperhatikan. Sebab jika mutu suatu lembaga pendidikan yang berjalan tanpa

Nur Ahmad Ruyani, 2012

Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Kepala sekolah dan Iklim Organisasi terhadap Efektivitas Sekolah ( Studi Deskriptif Analitik di SMP Negeri Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

berpegang pada tujuan akan sulit mencapai apa yang diharapkan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekolah senantiasa harus berpegang pada tujuan sehingga mampu menghasilkan output yang berkualitas.

Dengan adanya tujuan seperti itu dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan pendidikan nasional, intruksional maupun tujuan yang lain yang sebih sempit.

## 2. Faktor Guru

Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus benar-benar membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mampu mempengaruhi siswanya. Guru harus berpandangan luas dan kriteria bagi seorang guru ialah harus memiliki kewibawaan.

Guru merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, karena gurulah yang merupakan aktor utama dalam melaksanakan kegiatan pendidikan.

## 3. Faktor Siswa

Anak didik atau siswa merupakan objek dari pendidikan, sehingga mutu pendidikan pada sebuah sekolah yang akan dicapai tidak akan lepas dengan ketergantungan terhadap kondisi fisik tingkah laku dan minat bakat dari anak didik.

#### 4. Faktor Alat

Yang dimaksud faktor alat (alat pendidikan), adalah segala usaha atau tindakan dengan sengaja yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan ini merupakan masalah yang esensial dalam pendidikan, karena itu perlu dilakukan upaya untuk menyediakan alat-alat tersebut. Yang dikategorikan sebagai alat pendidikan adalah sesuatu yang dapat memenuhi tercapainya tujuan pendidikan yaitu sarana, prasarana, dan kurikulum.

#### 5. Faktor Lingkungan/Masyarakat

Kemajuan pendidikan sedikit banyak dipengaruhi oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, karena tanpa adanya bantuan dan kesadaran dari masyarakat sulit untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan. Sekolah dan masyarakat merupakan dua kelompok yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Karena itulah dibentuk komite sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan No. 044/V/2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka otonomi sekolah bermitra kerja dengan Komite Sekolah. Peran Komite Sekolah memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol, mediator antara pemerintah dan masyarakat.

#### 6. Faktor Biaya

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap

upaya pencapaian tujuan pendidikan – baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif – biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Sebagaimana menurut Supriadi (2006: 3) bahwa hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan bermutu di sekolah tidak akan dapat dicapai. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.

#### **b. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi manajemen pembiayaan sekolah terhadap mutu sekolah di SMP Negeri Se-Kota Bandung?
2. Seberapa besar kontribusi kinerja mengajar guru terhadap mutu sekolah di SMP Negeri Se-Kota Bandung?
3. Seberapa besar kontribusi manajemen pembiayaan sekolah dan kinerja mengajar guru terhadap mutu sekolah di SMP Negeri Se-Kota Bandung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi manajemen pembiayaan sekolah terhadap mutu sekolah di SMP Negeri Se-Kota Bandung.

Nur Ahmad Ruyani, 2012

Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Kepala sekolah dan Iklim Organisasi terhadap Efektivitas Sekolah ( Studi Deskriptif Analitik di SMP Negeri Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kinerja mengajar guru terhadap mutu sekolah di SMP Negeri Se-Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi manajemen pembiayaan sekolah dan kinerja mengajar guru terhadap mutu sekolah di SMP Negeri Se-Kota Bandung.

#### **D. Metode Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, metode survey menurut Sugiyono (2007: 12) yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang bersifat alamiah artinya bukan data buatan ataupun hasil pengkondisian (eksperimen). Penelitian ini bersifat non eksperimen dan data dijangkau dengan menggunakan kuesioner.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara akademis dan praktis.

##### **a. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini, secara akademis diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan di bidang pembiayaan pendidikan khususnya di tingkat sekolah, kinerja mengajar guru, dan mutu sekolah pada khususnya, serta ilmu administrasi pendidikan pada umumnya. Di samping itu, diharapkan juga

Nur Ahmad Ruyani, 2012

Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Kepala sekolah dan Iklim Organisasi terhadap Efektivitas Sekolah ( Studi Deskriptif Analitik di SMP Negeri Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu



sebagai penelitian awal yang di kemudian hari akan ditindaklanjuti dengan penelitian lain di bidang pembiayaan sekolah, kinerja mengajar guru, dan mutu sekolah yang lebih aplikatif.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini, secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai cambuk bagi kita bahwa belum saatnya kita berbangga diri dengan segala perkembangan yang ada karena ternyata mutu sekolah yang ada masih harus terus ditingkatkan. Selain itu, diharapkan menjadi bahan masukan bagi pejabat-pejabat yang berwenang dalam menciptakan kebijakan guna mengupayakan peningkatan manajemen pembiayaan sekolah, dan mutu sekolah secara merata.

#### **F. Struktur Organisasi Tesis**

Untuk memudahkan pemahaman dan pemecahan masalah secara lebih terstruktur dan sistematis, maka penulis menyusun suatu bentuk penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, serta struktur urutan pembahasan tesis.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

Menguraikan landasan teori berupa uraian mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini sebagai dasar pemikiran dan pemecahan masalah

Nur Ahmad Ruyani, 2012

Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Kepala sekolah dan Iklim Organisasi terhadap Efektivitas Sekolah ( Studi Deskriptif Analitik di SMP Negeri Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

yang kemudian dijadikan kerangka pikir penelitian untuk selanjutnya diperoleh hipotesis penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang lokasi dan subjek populasi/sampel penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi keseluruhan data dari hasil observasi dan kuesioner. Memaparkan hasil pengolahan data berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan serta hasil analisis data yang dilakukan. Hasil analisis ini kemudian dilakukan pembahasan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi sajian penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Saran atau rekomendasi yang dihasilkan ditujukan kepada para pengguna hasil penelitian serta kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.